

PENGARUH DANA BELANJA OPERASIONAL SEKOLAH TERHADAP KEMISKINAN DI SULAWESI UTARA

Paulo Grasiano Izaak Kawatu¹, Anderson G. Kumenaung², George M.V. Kawung³
paulokawatu12@gmail.com

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Universitas Sam Ratulangi*

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan masalah bangsa yang mendesak untuk diselesaikan karena kemiskinan bersifat persisten atau cenderung bertahan dari waktu ke waktu. Bahkan SDGs (*Sustainable Development Goals*) dengan 17 tujuan sebagai kelanjutan dari MDGs (*Millennium Development goals*) tetap memprioritaskan masalah kemiskinan sebagai tujuan pembangunan. Masalah kemiskinan merupakan salah satu agenda MDGs yang belum terselesaikan sampai tahun 2015. Dan menjadi perhatian pemerintah dalam rangka mensukseskan SDGs dimana kemiskinan masih merupakan prioritas utama dari 17 indikator yang ada. Pembangunan ekonomi di Indonesia saat ini sedang dihadapkan terhadap masalah kemiskinan.

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dana bantuan operasional sekolah terhadap kemiskinan di Sulawesi Utara. Dengan menggunakan data panel.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dana bantuan operasional sekolah memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di Sulawesi Utara secara menyeluruh.

Kata Kunci: Kemiskinan dan Bantuan Operasional Sekolah

ABSTRACT

Poverty is a problem to solve the urgent because poverty is persistent intent or inclined to persist over time .Even sdgs (sustainable development goals) with 17 goals as a continuation of the mdgs the millennium development goals () keeps prioritizing poverty issues as development goals .The problem of poverty is an unresolved matters until 2015 .And in order to help the government attention sdgs where poverty is still the priority of 17 indicators is .Economic development in indonesia is currently faced on the problem of poverty .

In this research aims to analyse the influence of school operational assistance to poverty in north sulawesi .Using data panel

Based on a research shows that operational fund kemsikinan students have the effect on in north sulawesi thoroughly

Keyword: Poverty and school operational assistance

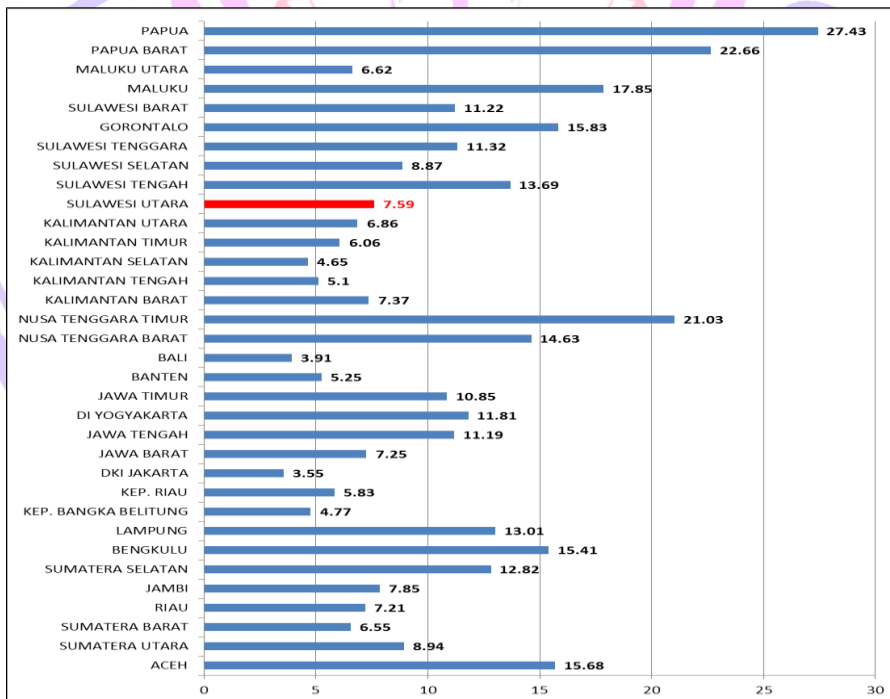
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah bangsa yang mendesak untuk diselesaikan karena kemiskinan bersifat persisten atau cenderung bertahan dari waktu ke waktu. Bahkan SDGs (*Sustainable Development Goals*) dengan 17 tujuan sebagai kelanjutan dari MDGs (*Millennium Development goals*) tetap memprioritaskan masalah kemiskinan sebagai tujuan pembangunan. Masalah kemiskinan merupakan salah satu agenda MDGs yang belum terselesaikan sampai tahun 2015. Dan menjadi perhatian pemerintah dalam rangka mensukseskan SDGs dimana kemiskinan masih merupakan prioritas utama dari 17 indikator yang ada. Pembangunan ekonomi di Indonesia saat ini sedang dihadapkan terhadap masalah kemiskinan.

Masalah kemiskinan merupakan persoalan mendasar yang menja di pusat perhatian pemerintah semua negara atau daerah, karena saat ini kemiskinan membuat banyak masyarakat Indonesia mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Bukan hanya masalah pendapatan, tetapi juga menyangkut kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang, baik laki maupun perempuan untuk menjadi miskin (Widiastuti, 2016). Presentase kemiskinan di Indonesia Tahun 2014 sampai dengan 2018 berfluktuasi, di Tahun 2015 presentase penduduk miskin di Indonesia meningkat dan kembali menurun sampai pada Tahun 2018. Dan jika dilihat dari masing-masing Provinsi yang ada di Indonesia, dari lima besar penduduk miskin terbanyak cenderung ke Indonesia bagian timur. Papua berada di urutan teratas , kemudian di ikuti oleh provinsi Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Gorontalo. Grafik 1 menampilkan presentase penduduk miskin dari semua Provinsi di Indonesia.

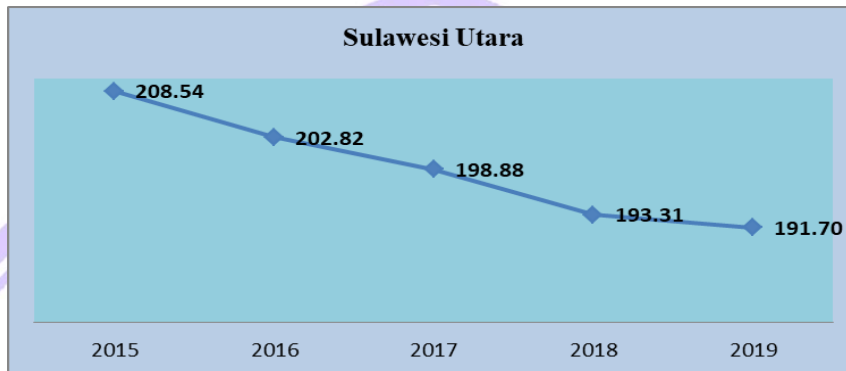
Grafik 1
Presentase Kemiskinan Masing-masing Provinsi di Indonesia Tahun 2018



Sumber : BPS Indonesia Tahun 2019

Presentase penduduk miskin masing-masing di Indonesia menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Utara cenderung lebih dibawah dibandingkan dengan Provinsi lainnya yang berada di Indonesia bagian timur, dengan nilai presentase sebesar 7,59 persen. Dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin berfluktuasi tetapi cenderung menurun hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2
Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015-2019

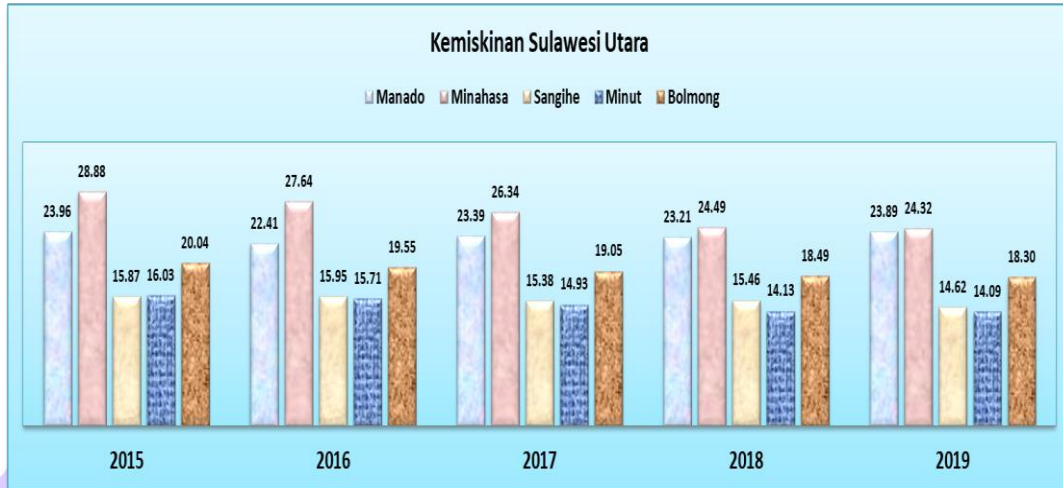


Sumber : BPS Sulut Tahun 2016-2020 (data diolah)

Kemiskinan di Tahun 2019 menurun dan Sulawesi Utara merupakan salah satu Provinsi dengan kemiskinan yang terendah. BPS Provinsi Sulawesi Utara menyatakan bahwa persentase penduduk miskin di Sulut pada bulan Maret sebesar 7,66 persen atau terendah se-Sulawesi bahkan juga berada di bawah nasional yang besarnya 9,41 persen. Kendati demikian kemiskinan Sulut tersebut meningkat sedikit atau sekitar 0,07 point dibandingkan dengan September 2018 yang besarnya 7,59 persen. Sedangkan jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2018 atau Maret 2018 yang mencapai 7,80 persen, berarti mengalami penurunan sebesar 0,14 point.

Adapun untuk pedesaan, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan Maret 2019 lebih rendah dibandingkan dengan September 2018. Hal ini berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin pedesaan semakin mendekati garis kemiskinan serta juga ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin rendah. Selama periode September 2018 – Maret 2019 terjadi inflasi atau peningkatan harga-harga secara umum sebesar 2,54 persen, dimana kelompok bahan makanan mengalami inflasi paling tinggi, yaitu mencapai 6,99 persen selain itu Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk pada kelompok 40 persen menengah dan 20 persen teratas mengalami penurunan dibanding September 2018, yaitu secara berurutan sebesar 1,03 persen dan 0,80 persen. Secara total, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk mengalami penurunan 0,25 persen. Tetapi jika dilihat kecenderungan presentase penduduk miskin mengalami penurunan terutama di Tahun 2018. Dan untuk beberapa daerah Kabupaten dan Kota yang merupakan sasaran penelitian diantaranya Kota Manado, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondow dalam pergerakan angka kemiskinan dapat dilihat pada gambar grafik berikut:

Grafik 3
Penduduk Miskin di 5 Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara
Tahun 2015-2019

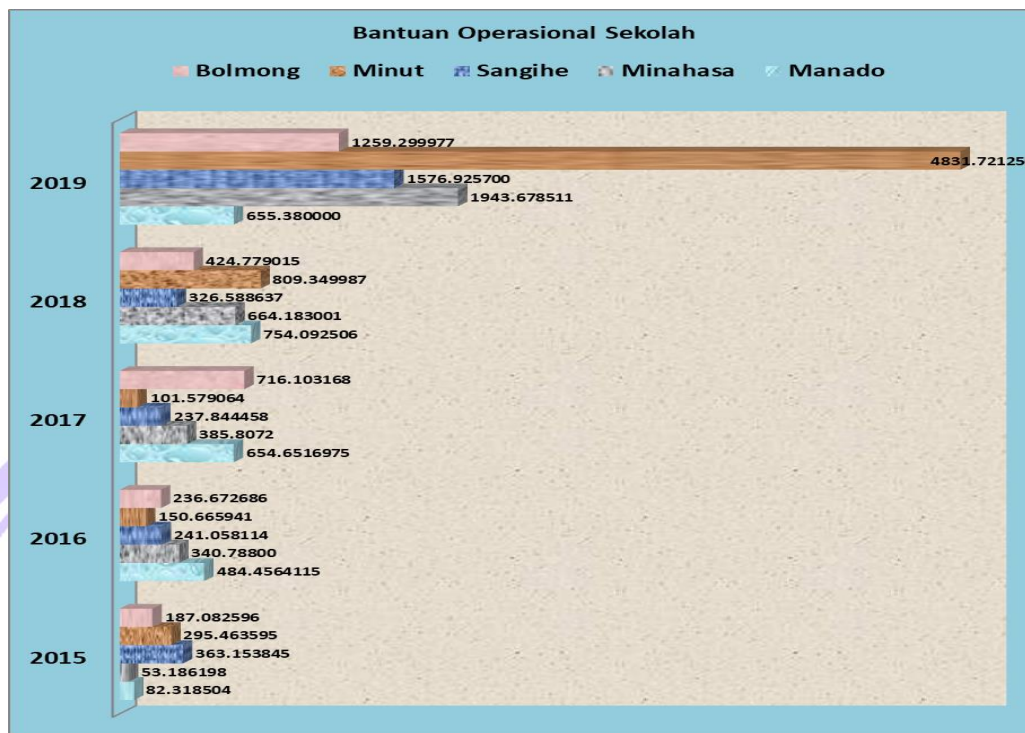


Sumber : Sulawesi Utara dalam angka, 2016-2020

Perkembangan kemiskinan di masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara untuk daerah Kota Manado mengalami peningkatan angka kemiskinan di tahun 2019 mencapai angka 23,89 dan Kabupaten Minahasa mengalami sedikit penurunan untuk jumlah penduduk miskin di tahun 2019 dengan nilai 24,32, dan daerah kabupaten kabupaten kepulauan Sangihe dengan perkembangan angka kemiskinan di Tahun 2019 mengalami penurunan 14,62, kabupaten Minahasa Utara di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 14,09 dan kemiskinan di kabupaten Bolaang mongondow mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 18,30, jika diperhatikan kemiskinan terbesar untuk beberapa daerah penelitian ini ada di daerah perkotaan, alasanya karena jumlah penduduk yang ada di Kota lebih banyak. Masyarakat tentunya sangat berharap dengan arah kebijakan dan strategi yang tepat, setiap terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dalam pembangunan dapat membawa perubahan kualitas hidup masyarakat ke arah yang lebih baik lagi. Dan salah satu Program pemerintah yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui tingkat pendidikan dengan di berlakukannya bantuan operasional sekolah dan untuk realisasi anggaran dana bos dari 5 kabupaten kota dapat dilihat pada gambaran grafik berikut:

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 PROGRAM MAGISTER ILMU EKONOMI

Grafik 4
Realisasi Dana BOS di 5 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2015-2019



Sumber : Website Dana BOS, Tahun 2016-2020

Berdasarkan grafik dapat kita lihat bahwa perkembangan yang signifikan untuk penyaluran anggaran dalam pengoperasian dana bos, dan untuk Tahun 2019 penerima dana terbanyak ada di Kabupaten Minahasa Utara, sementara untuk kota Manado hanya sedikit jika dibandingkan dengan daerah lain. Program dana bos diharapkan mampu menunjang setiap masyarakat yang memiliki anak di usia sekolah untuk dapat di manfaatkan sebaik mungkin guna meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam memberantas kemiskinan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana pengaruh anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap kemiskinan di 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara?

Tujuan Penelitian

Menganalisis pengaruh anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap kemiskinan di 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara

Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, penelitian ini berguna dalam mengaplikasikan ilmu yang diterima selama masa perkuliahan dan pengalaman dan didapat selama magang di UPTB Balai Penanggulangan Kemiskinan Daerah BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara.
2. Sebagai pengambil kebijakan bagi pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan kebijakan dalam mengelola anggaran terlebih anggaran dana BOS
3. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat sebagai salah satu media informasi, sarana pembelajaran dan bahan untuk penelitian selanjutnya terutama dalam mengatasi Kemiskinan.

Tinjauan Pustaka

Landasan Teori

• **Pembangunan Ekonomi**

Pembangunan adalah suatu rangkaian gerak perubahan menuju arah kemajuan, perubahan tersebut direncanakan berdasarkan norma-norma tertentu. Pembangunan juga berartikan sebagai rangkaian usaha dan kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai keadaan lepas landas, atau mungkin keadaan yang penuh dengan dorongan kearah kematangan. (Sadono Sukirno: 2006; 53).

• **Kemiskinan**

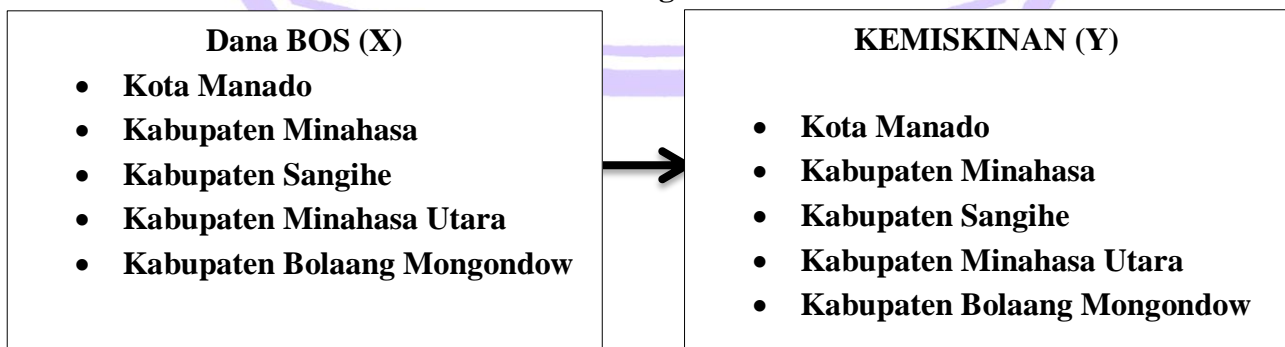
Teori-teori kemiskinan pada umumnya bermuara pada dua paradigma besar yang juga berpengaruh pada pemahaman mengenai kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan. Dua paradigma yang dimaksud adalah Neo-Liberal dan Demokrasi-sosial. Dua paradigma ini memiliki perbedaan yang sangat jelas terutama dalam melihat kemiskinan maupun dalam memberikan solusi penyelesaian masalah kemiskinan.

• **Anggaran**

Anggaran adalah rencana kerja mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, Selain itu anggaran juga dapat dinyatakan dalam satuan unit barang/jasa. Sedangkan menurut Garrison dan Noreen (2000) anggaran adalah rencana rinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya untuk suatu periode tertentu.

Kerangka Pemikiran Teoritis

Gambar 1 Skema Kerangka Pemikiran Teoritis



Hipotesa

Berdasarkan skema kerangka pemikiran yang ada maka di tarik hipotesa sebagai berikut:
Diduga Dana Bos berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik yaitu data jumlah penduduk miskin yang ada di 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara yaitu Kota Manado, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondow, dan data anggaran Dana Banguan Operasional Sekolah (BOS) dari 5 Kabupaten Kota yaitu Kota Manado, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kabupaten Bolaang Mongondow yang berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara dan website resmi dana BOS.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan turun langsung ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara berupa data *soft copy* mengenai anggaran Dana BOS dan data jumlah penduduk miskin dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara berupa *soft copy*.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

- Tingkat Kemiskinan sebagai variabel terikat (Y) adalah tingkat Kemiskinan Provinsi yang diukur dalam satuan persentase (%)
- Dana BOS sebagai variabel X adalah anggaran pemerintah yang digunakan untuk operasional sekolah dalam satuan rupiah.

Metode Analisis

Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan analisis data panel dimana data panel merupakan kombinasi antar data *time series* dan data *cross section*. Data *cross section* adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap banyak individu, sedangkan *time series* data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Analisis regresi data panel adalah alat analisis regresi dimana data dikumpulkan secara individu (*cross section*) dan diikuti pada waktu tertentu (*time series*). Data panel merupakan gabungan dari data *cross section* dan data *time series*, maka persamaan regresinya menggunakan alat *eviews 9* sebagai berikut: (Mahulete, 2016).

$$\log(Y_{it}) = \alpha + \beta \log(BOS_{it})$$

Dimana:

$\log(Y_{it})$ = Kemiskinan

α = Konstanta

- β = Koefisien Regresi
- log(BOS_{it}) = Belanja Operasional Sekolah Kabupaten/Kota i pada tahun t
- D1 = *Dummy* Variabel
- eit* = *Error Term*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel

Permodelan dalam menggunakan teknik analisis regresi data panel dapat menggunakan tiga pendekatan alternatif metode dalam pengolahannya. Pendekatan-pendekatan tersebut adalah metode *Common-Constant (The Pooled OLS Method)* atau *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, dan *Random Effect Model (REM)*.

Common Effect Model

Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar objek sama dalam berbagai kurun waktu. Metode *Pooled Least Square* akan dipilih saat tidak terdapat perbedaan diantara data matrix pada dimensi *cross section*.

Tabel 1
Hasil Regresi *Common Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
BOS?	0.038433	0.006457	5.952309	0.0000
R-squared	7.140143	Mean dependent var	19.84520	
Adjusted R-squared	7.140143	S.D. dependent var	4.627600	
S.E. of regression	13.20298	Akaike info criterion	8.037940	
Sum squared resid	4183.646	Schwarz criterion	8.086695	
Log likelihood	-99.47425	Hannan-Quinn criter.	8.051462	
Durbin-Watson stat	1.130665			

Sumber: olahan eviews 0.8

Berdasarkan hasil regresi *common effect model*, terlihat bahwa variabel bebas anggaran Dana BOS (X) menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0.038433. dengan begitu hubungan variabel telah sesuai dengan landasan teoritis, dan variabel Dana BOS berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat dilihat dari nilai t hitung hanya sebesar 5.952309 sementara t tabel sebesar 2,132 dimana jika t hitung lebih besar dari t tabel menunjukkan bahwa variabel bebas anggaran belanja operasional sekolah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan. Dari hasil regresi tersebut diperoleh nilai R² kecil yaitu sebesar 7.140143. Dalam hasil penelitian ini menunjukkan angka positif dan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap

kemiskinan, karena dalam hal ini anggaran pendidikan yang di salurkan berupa anggaran dana BOS ditujukan khusus untuk siswa yang kurang mampu dalam mengenyam bangku pendidikan.

Fixed Effect Model

Pendekatan ini memperhatikan adanya keberagaman (heterogenitas) masing-masing individu, terutama pada variabel bebas. Keberagaman individu ditangkap melalui intersep α yang berbeda untuk setiap individu (dalam hal ini setiap persamaan individu). Struktur model ini mengasumsikan adanya perbedaan karakteristik masing-masing variabel selama waktu observasi.

Tabel 2
Hasil Regresi Menggunakan Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	20.11224	0.357200	56.30524	0.0000
BOS?	-0.000859	0.000911	-0.943170	0.3574
Fixed Effects				
(Cross)				
_MANADO—C	3.711665			
_MINAHASA—C	6.470120			
_SANGIHE—C	-4.455235			
_MINUT—C	-4.969280			
_BOLMONG—C	-0.757270			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.956167	Mean dependent var	19.84520	
Adjusted R-squared	0.944632	S.D. dependent var	4.627600	
S.E. of regression	1.088891	Akaike info criterion	3.213759	
Sum squared resid	22.52797	Schwarz criterion	3.506289	
Log likelihood	-34.17199	Hannan-Quinn criter.	3.294894	
F-statistic	82.89308	Durbin-Watson stat	0.674122	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Eviews 0.8

Hasil regresi menunjukkan variabel bebas yang diharapkan berhubungan negatif dengan variabel terikat, dan untuk hasil dari anggaran dana BOS menunjukkan nilai dengan koefisien sebesar -0.943170. Selain hubungan variabel telah sesuai dengan landasan teoritis, variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat dengan $\alpha=5\%$. Dari hasil regresi tersebut diperoleh nilai R^2 sebesar 0.956167. dan untuk nilai koefisien dari masing-masing daerah yaitu Kota Manado menunjukkan angka positif dengan nilai 3.711665, Kabupaten Minahasa 6.470120, sementara untuk 3 Kabupaten lainnya justru menunjukkan angka negative yaitu Kabupaten dengan

nilai koefisien -4.455235, Kabupaten Minahasa Utara dengan nilai koefisien sebesar -4.969280. dan Kabupaten Bolaang Mongondow sebesar -0.757270.

Random Effect Model

Pendekatan *random effect* merupakan pendekatan yang setiap persamaannya mempertimbangkan karakteristik individu. Dengan kata lain, model *random effect* adalah model yang mempertimbangkan kondisi acak (terdistribusi normal) antara rata-rata dengan karakteristik individu yang bersifat *random* (Ekananda. 2016).

Tabel 3
Hasil Regresi Menggunakan Random Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	20.09276	2.068029	9.715902	0.0000
BOS?	-0.000796	0.000909	-0.875522	0.3903
Random Effects (Cross)				
_MANADO—C	3.656387			
_MINAHASA—C	6.398349			
_SANGIHE—C	-4.400124			
_MINUT—C	-4.905761			
_BOLMONG—C	-0.748851			
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			4.554866	0.9459
Idiosyncratic random			1.088891	0.0541
R-squared	0.031207	Mean dependent var		2.109654
Adjusted R-squared	-0.010915	S.D. dependent var		1.101596
S.E. of regression	1.107591	Sum squared resid		28.21545
F-statistic	0.740872	Durbin-Watson stat		0.535907
Prob(F-statistic)	0.398266			

Berdasarkan hasil regresi diatas, terlihat bahwa dari variabel bebas yang diharapkan mempunyai hubungan yang negatif dengan variabel terikat, hanya satu variabel yang mempunyai hubungan negatif sesuai dengan landasan teoritis, yaitu variabel Dana BOS dengan koefisien sebesar -0.000796. Meskipun hubungan variabel telah sesuai dengan landasan teoritis, tetapi variabel tersebut hanya berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat pada tingkat kepercayaan 10% dan bukan pada tingkat kepercayaan 5%. Dari hasil regresi tersebut diperoleh nilai R² yang hanya sebesar 0.031207.

Penentuan Metode Estimasi Regresi Data Panel

Uji Statistik F (Uji Chow)

Uji Chow adalah pengujian yang dilakukan untuk menentukan model yang tepat diantara *Common Effect* atau *Fixed Effect* untuk digunakan dalam mengestimasi data panel.

Tabel 4 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Pool: P			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	98.669907	(4,19)	0.0000
Cross-section Chi-square	77.016321	4	0.0000

Sumber: *evIEWS 0.8*

Berdasarkan tabel uji Chow diatas, kedua nilai probabilitas *Cross-section F* dan *Cross-section Chi-square* memiliki nilai yang lebih kecil dari α 5% atau 0.05, sehingga menolak hipotesis nol. Jadi menurut uji Chow, metode yang terbaik digunakan adalah *Fixed Effect*.

Uji Hausman

Uji Hausman adalah pengujian yang dilakukan untuk menentukan model yang tepat diantara *Fixed Effect* atau *Random Effect* untuk digunakan dalam mengestimasi data panel.

Tabel 5 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.796793	1	0.01801

Sumber: *hasil olahan evIEWS 0.8*

Berdasarkan tabel uji Hausman, nilai probabilitas *Cross-section Random* adalah 0,0004. Nilai tersebut lebih kecil dari α 5% atau 0.05, sehingga menolak hipotesis nol. Jadi menurut uji Hausman, metode yang terbaik digunakan adalah *Fixed Effect*.

Pembahasan

Hasil penelitian penelitian ini menunjukkan bahwa anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah yang ada di 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap terhadap kemiskinan. Berdasarkan tujuan dari dana BOS itu sendiri menyatakan bahwa Operasional sekolah (BOS) bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 12 tahun khususnya bagi siswa yang kurang mampu dalam hal ini siswa

yang secara materi berkekurangan untuk menempu bangku pendidikan. Program pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dimaksudkan sebagai bantuan kepada sekolah dalam rangka membebaskan iuran siswa namun sekolah tetap dapat mempertahankan mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Pemberian program BKM dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat keluarga kurang/tidak mampu akan layanan Tujuan Program BOS menurut Buku Panduan 2006: Program Bantuan pendidikan jenjang Sekolah Lanjutan Atas dan yang sederajat (SLA dan sederajat). Dana BOS yang berasal dari Pemerintah/APBN adalah dana bantuan yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan 8 program wajib belajar. Bantuan yang bertujuan meringankan beban masyarakat terhadap biaya pendidikan siswa dalam rangka wajib belajar 9 tahun itu merupakan hak setiap siswa yang disalurkan melalui sekolah untuk mendanai biaya operasional. Dan sangat besar manfaatnya untuk berbagai pihak, termasuk siswa maupun orangtua siswa.

Melalui program BOS, Pemerintah Pusat memberikan bantuan dana “blockgrant” kepada sekolah. Sekolah dapat menggunakan dana tersebut untuk keperluan operasional sekolah, khususnya biaya operasional non personil sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam buku petunjuk pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bayu Kharisma 2013 dengan judul penelitian “Dampak Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Tingkat Putus Sekolah di Indonesia: Analisis DID. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak bantuan BOS terhadap siswa usia 7-15 tahun terhadap tingkat putus secara statistik. Sementara itu, jika yang dihitung hanya dibatasi pada pengaruh siswa usia 16-20 tahun yang sebelumnya telah menerima manfaat BOS maka terlihat bahwa program BOS memiliki pengaruh positif terhadap tingkat putus sekolah. Namun, anak yang berusia 16-20 tahun yang sebelumnya tidak menerima manfaat program BOS justru berpengaruh negatif terhadap tingkat putus sekolah. Berdasarkan pada kenyataan tersebut, manfaat program BOS setelah kenaikan BBM di Indonesia selama periode penelitian masih belum efektif dalam menurunkan tingkat putus sekolah. Hasil Analisa data yang diperoleh bahwa tujuan BOS bahwa Program BOS sangat membantu meringankan beban keluarga yang kurang mampu memenuhi terhadap biaya pendidikan sehingga sangat membantu keluarga miskin atau tidak mampu dalam mengenyam pendidikan sebagaimana semestinya guna mendukung pencapaian program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun serta program ini sangat bermanfaat untuk berbagai pihak, termasuk siswa maupun orangtua siswa.

Hasil analisis data dari Mustika W Sastia Hutasushut (2015) yang dilakukan dapat diketahui bahwa Program Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Dasar Negeri No. 125549 Kelurahan Martoba kecamatan Siantar Utara Pematangsiantar berjalan dengan baik. Dalam hal ini program BOS sangat membantu meringankan beban keluarga terhadap biaya pendidikan sehingga sangat membantu keluarga miskin atau tidak mampu dalam mengenyam pendidikan sebagaimana semestinya guna mendukung pencapaian program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun serta program ini sangat bermanfaat untuk berbagai pihak, termasuk siswa maupun orangtua siswa.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Indonesia akan memasuki penghujung decade pertama pelaksanaannya. Selama periode tersebut, program ini telah mengalami perbaikan terus menerus dan menyalurkan dana bantuan dalam jumlah besar yang pernah ada secara langsung ke sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Keberhasilan program ini dalam memberikan

dana operasional untuk sekolah telah direplikasi di bagian lain dalam sistem pendidikan dan oleh berbagai pemerintah daerah. Pada tahun 2014, semua jenjang dalam sistem pendidikan, dari PAUD hingga perguruan tinggi, memiliki program sejenis 'BOS', dan sekitar sepertiga dari semua pemerintah

daerah melaksanakan program serupa. Naskah kebijakan ini bertujuan untuk mengkaji apakah program BOS telah berhasil memberikan kontribusi terhadap perluasan akses terhadap pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan. Naskah kebijakan ini memberikan gambaran umum tentang temuan-temuan dan merangkum saran-saran dari laporan utama yang mengkaji peran BOS dalam memperbaiki hasil-hasil pendidikan, Memperbaiki pendidikan melalui pemanfaatan hibah untuk sekolah. Pembuat kebijakan pendidikan semakin menyadari pentingnya memberdayakan sekolah untuk membuat keputusan sendiri dalam upaya untuk memperbaiki hasil-hasil pendidikan. Banyak negara telah mengakui bahwa sekolah itu sendiri sering berada di posisi yang lebih baik daripada instansi pemerintah pusat untuk membuat keputusan yang efektif tentang beberapa aspek pengajaran dan pembelajaran. Pengakuan ini telah mendorong banyak negara memperkenalkan reformasi manajemen berbasis sekolah yang bertujuan untuk memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dan masyarakat yang dilayaninya untuk mengelola urusan mereka sendiri. Reformasi ini juga telah mendukung akuntabilitas sekolah yang lebih kuat melalui pembentukan organisasi pengaturan sekolah yang lebih inklusif dan melibatkan orang tua serta masyarakat setempat yang berasal dari kalangan yang lebih luas.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa analisis panel menunjukkan bahwa Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah yang ada di Sulawesi Utara, khususnya daerah Kota Manado, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondow memberikan pengaruh terhadap kemiskinan.

Saran

1. Dengan adanya dana BOS diharapkan semua pihak yang terkait ikut bertanggung jawab atas realisasi atau penyaluran dari dana BOS tersebut. Sehingga penyaluran dana BOS tepat sasaran. Dengan demikian penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat berjalan dengan baik, khususnya terhadap anggaran pendidikan yang tinggi tidak lagi menjadi alasan siswa tidak dapat mengikuti pembelajaran di sekolah. Dengan begitu minat siswa meningkat untuk lebih giat belajar, karena adanya buku pelajaran gratis. Otomatis prestasi siswa akan meningkat pula.
2. Untuk pemerintah Sulawesi Utara agar dapat dijadikan masukan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Utara.

DAFTAR PUSTAKA

Bappenas 2004

Bank Dunia 2014

Budhi, M. K. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Bali: Analisis FEM Data Panel. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol. 6. No. 1

Cheyne, Christine, Mike O'Brien and Michael Belgrave. 1998. *Social Policy in Aotearoa New Zealand: A Critical Introduction*. Auckland, Oxford University Press.

Gunawan, Mujiyadi, Styosoemarno. 2006. *Pengembangan Model Pemberdayaan Keluarga Miskin di Sekitar Kawasan Industri*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.

Hikmat Harry (2004). Strategi pemberdayaan masyarakat: edisi revisi bandung: Humaniora Utama Pluss

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif.

Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Dasar - dasar Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi & Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, dtrategi, dan Peluang, Jakarta: Erlangga.

Mahulete, Ummi K. (2016). *Pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Malang.

Nasikun, 2001. *Bahan Kuliah; Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan*. Magister Administrasi Publik. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada

Owin. 2004. *Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Blantika.

Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan